

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H

HUKUM TATA NEGARA



HUKUM TATA NEGARA

HUKUM TATA NEGARA

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H.

Penerbit Indonesia Imaji

2023

HUKUM TATA NEGARA

Penulis:

Andrianto Prabowo, S.H., M.Si., M.H.

Desain Cover:

Ahmad Bukhari

Tata Letak:

Ahmad Sofi

ISBN:

978-623-8067-21-3

Cetakan Pertama:

Oktober, 2023

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : xii + 192 halaman

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Indonesia Imaji

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

(Grup CV. Indonesia Imaji)

Jalan Kedunglurah-Ngadirejo, Kedunglurah, Kecamatan Pogalan,
Treggalek (66371)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

Website: www.indonesiaimaji.com

KATA PENGANTAR

Hukum Tata Negara, atau sering disebut juga sebagai hukum konstitusi, adalah cabang hukum yang berkaitan dengan struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar dari suatu negara atau entitas politik. Hukum tata negara mengatur bagaimana pemerintahan suatu negara diatur, beroperasi, dan diawasi, serta menjelaskan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta antara cabang-cabang pemerintah dalam suatu sistem politik. Beberapa aspek penting dari hukum tata negara meliputi konstitusi, kedaulatan, pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, lembaga-lembaga pemerintah, proses pembuatan undang-undang, dan berbagai isu politik yang terkait.

Hukum tata negara juga berfungsi untuk menentukan dan melindungi hak-hak dan kebebasan individu, mengatur cara-

PRAKATA

Buku ini merupakan sebuah persembahan bagi semua yang tertarik untuk memahami dan menggali lebih dalam tentang hukum tata negara, atau yang sering juga disebut sebagai hukum konstitusi. Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mendasari dan memengaruhi setiap aspek kehidupan kita dalam masyarakat yang diatur oleh sebuah negara. Melalui buku ini, kami berusaha untuk memberikan pandangan yang luas dan komprehensif mengenai hukum tata negara dalam konteks negara hukum dan sistem pemerintahan.

Buku ini didesain untuk menjadi panduan yang berharga bagi para mahasiswa, praktisi hukum, pejabat pemerintah, dan siapa pun yang ingin mendalami dan memahami hukum tata negara. Saya percaya bahwa pengetahuan tentang hukum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Prakata	viii
Daftar Isi	x
BAB I GAMBARAN UMUM HUKUM TATA NEGARA.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran	2
C. Uraian Materi	4
D. Latihan	11
E. Rangkuman Materi	11
F. Daftar Pustaka	12
BAB II KONSEP DASAR HUKUM TATA NEGARA	15
A. Pendahuluan	15
B. Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran	15
C. Uraian Materi	18
D. Latihan	43
E. Rangkuman Materi	44
F. Daftar Pustaka	45

BAB III ASPEK DAN SISTEM NEGARA HUKUM	53
A. Pendahuluan	53
B. Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran	54
C. Uraian Materi	56
D. Latihan	85
E. Rangkuman Materi	85
F. Daftar Pustaka	86
 BAB IV KETATANEGARAAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN ...	97
A. Pendahuluan	97
B. Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran	98
C. Uraian Materi	100
D. Latihan	139
E. Rangkuman Materi	139
F. Daftar Pustaka	140
 BAB V ASPEK POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN	151
A. Pendahuluan	151
B. Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran	152
C. Uraian Materi	154
D. Latihan	182
E. Rangkuman Materi	183
F. Daftar Pustaka	184
 Tentang Penulis	191

BAB I

GAMBARAN UMUM HUKUM TATA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Sebagai langkah awal yang krusial dalam memahami landasan dan kerangka kerja hukum tata negara suatu negara. Dalam konteks ini, materi pendahuluan bertujuan untuk memberikan gambaran yang luas dan holistik tentang hukum tata negara, termasuk sejarah, konsep dasar, dan relevansinya dalam tatanan politik dan hukum. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi bagaimana hukum tata negara membentuk landasan konstitusi suatu negara, mengatur struktur pemerintahan, dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Selain itu, materi ini juga akan membahas perkembangan hukum tata negara seiring waktu, serta peran

BAB II

KONSEP DASAR HUKUM TATA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Konsep Dasar Hukum Tata Negara memiliki peran penting dalam memahami fondasi dan prinsip-prinsip mendasar yang membentuk sistem hukum tata negara. Konsep dasar ini menjadi pijakan yang mendukung dan membimbing struktur pemerintahan, pembentukan undang-undang, dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara dalam suatu negara. Dalam konteks ini, materi pendahuluan bertujuan untuk memperkenalkan para pembaca pada aspek-aspek kunci dari hukum tata negara, seperti konstitusi, kedaulatan, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu, pendahuluan

BAB III

ASPEK DAN SISTEM NEGARA HUKUM

A. PENDAHULUAN

Aspek dan Sistem Negara Hukum adalah langkah awal yang sangat penting dalam memahami landasan dan prinsip-prinsip mendasar yang membentuk suatu negara sebagai negara hukum. Konsep negara hukum menekankan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dalam suatu negara dan bahwa semua tindakan, termasuk tindakan pemerintah, harus tunduk pada hukum. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran luas tentang konsep negara hukum, termasuk aspek-aspek utama yang melibatkan supremasi hukum, kedaulatan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Konsep supremasi hukum

menjaga keseimbangan kekuasaan. Materi ini juga memberikan wawasan tentang berbagai sistem pemerintahan yang ada di seluruh dunia, seperti sistem parlementer, presidensial, dan federasi, serta perbedaan dan persamaan antara sistem-sistem tersebut. Dengan memahami aspek dan sistem negara hukum, kita dapat mengapresiasi pentingnya supremasi hukum dalam menjaga tatanan politik yang adil dan menjaga hak-hak individu. Materi ini juga mengilustrasikan bagaimana hukum tata negara menjadi kerangka kerja untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kontrol masyarakat. Kesimpulannya, pemahaman tentang aspek dan sistem negara hukum adalah pondasi yang krusial dalam memahami dan berpartisipasi dalam politik, hukum, dan masyarakat yang berjalan dengan baik, serta menjadi landasan untuk menjaga prinsip-prinsip dasar dalam tatanan politik dan hukum.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2020). *Pergulatan Syi'ah Dalam Konstelasi Politik Keagamaan Di Indonesia*.
- Achmad, D. R., Yudiansyah, R. M., Mufidah, S. M., & Oktivanny, V. (2023). *Landasan Hukum Dan Fondasi Tatanegaraan Yang Kuat*. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 636-642.
- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.
- Akbar, D. F. (2016). *Kajian Hukum Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*.

BAB IV

KETATANEGARAAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Ketatanegaraan dan Sistem Pemerintahan adalah konsep yang sangat penting dalam memahami struktur politik dan hukum suatu negara. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi konsep dasar dari ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang meliputi prinsip-prinsip dasar hukum tata negara, struktur pemerintahan, hubungan antara cabang-cabang pemerintahan, dan peran serta hak warga negara dalam proses politik. Ketatanegaraan mengacu pada konstitusi dan hukum dasar yang mengatur bagaimana negara diatur, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip mendasar yang menjadi pijakan sistem politik dan

itu, pemahaman tentang sistem pemerintahan telah memberikan gambaran tentang bagaimana kekuasaan dibagi antara cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Materi ini juga memungkinkan kita untuk memahami perbedaan dan persamaan antara berbagai sistem pemerintahan, termasuk sistem presidensial, parlementer, dan federasi, serta bagaimana sistem ini memengaruhi proses pengambilan keputusan dan pemerintahan. Kesimpulannya, pemahaman tentang ketatanegaraan dan sistem pemerintahan adalah kunci untuk mengerti bagaimana negara diatur, bagaimana peran pemerintah dan lembaga-lembaga politik dijalankan, serta bagaimana warga negara berinteraksi dalam proses politik. Ini adalah fondasi penting untuk berpartisipasi dalam politik, menjaga keadilan, dan memahami dinamika tatanan politik dan hukum suatu negara secara lebih mendalam.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D. R., Yudiansyah, R. M., Mufidah, S. M., & Oktivanny, V. (2023). Landasan Hukum Dan Fondasi Tatanegaraan Yang Kuat. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 636-642.
- Adhariana, I. T. (2022). *Pemikiran Amien Rais Dalam Agensi di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasa* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Aji, R. B., & Hermawan, E. S. (2020). *Dalam Perspektif Penguatan Nasion dan Nasionalisme*.
- Aldi Putra, A. (2022). *Urgensi Penetapan Garis Besar Haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam*

BAB V

ASPEK POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN

A. PENDAHULUAN

Aspek Politik dan Sistem Pemilihan adalah topik yang krusial dalam memahami cara politik dan pemilihan umum memengaruhi tatanan negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, kita akan menjelajahi aspek-aspek kunci dari politik, pemilihan umum, dan peran masyarakat dalam proses politik. Aspek politik mencakup pemahaman tentang sistem politik suatu negara, struktur partai politik, kelompok kepentingan, dan cara pembuatan keputusan politik. Ini mencakup analisis terhadap bagaimana pemerintahan bekerja, peran legislatur, eksekutif, dan yudikatif dalam membuat kebijakan, serta bagaimana pengambilan keputusan politik memengaruhi

TENTANG PENULIS

ANDRIANTO PRABOWO, S.H., M.Si., M.H.



Lahir di Semarang, 11 Oktober 1966. Tempat tinggal di JL. Sawunggaling No. 28 Bojonegoro RT 001. RW 001 Desa Kadipaten, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Beliau adalah Dosen Universitas Bojonegoro. Sarjana S-1 Ilmu Hukum di Bojonegoro, Lulus Tahun 2001, Sarjana S-2 Magister Adm. Publik di Surabaya, Lulus Tahun 2014, dan Sarjana S-2 Magister Hukum di Surabaya, Lulus Tahun 2020. Jabatan yang pernah di emban antara lain: Tahun 2002 s/d sekarang, sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Tahun 2014 s/d 2019 Sebagai Tenaga Ahli DPRD

Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2021 s/d Sekarang Sebagai Wakil Ketua pada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Bojonegoro (dibawah Kementrian Hukum dan HAM. RI.), Tahun 2022 s/d Sekarang Sebagai Wakil Rektor I Bidang Administrasi Akademik Universitas Bojonegoro.



HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara, atau sering disebut juga sebagai hukum konstitusi, adalah cabang hukum yang berkaitan dengan struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar dari suatu negara atau entitas politik. Hukum tata negara mengatur bagaimana pemerintahan suatu negara diatur, beroperasi, dan diawasi, serta menjelaskan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta antara cabang-cabang pemerintah dalam suatu sistem politik. Beberapa aspek penting dari hukum tata negara meliputi konstitusi, kedaulatan, pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, lembaga-lembaga pemerintah, proses pembuatan undang-undang, dan berbagai isu politik yang terkait.

Hukum tata negara juga berfungsi untuk menentukan dan melindungi hak-hak dan kebebasan individu, mengatur cara-cara perubahan konstitusi, serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam sistem politik suatu negara. Ini adalah kerangka hukum yang fundamental yang membentuk dasar bagi pemerintahan yang baik, keadilan, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Selain itu, hukum tata negara juga dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung pada sejarah, budaya, dan nilai-nilai politik yang ada dalam masing-masing negara. Oleh karena itu, studi hukum tata negara melibatkan pemahaman tentang perbandingan antarnegara dan perkembangan hukum tata negara di seluruh dunia. Hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara, sehingga menjadi fondasi utama dalam tatanan politik dan hukum suatu negara.

Buku ini menghadirkan suatu perjalanan yang mendalam dan penting dalam pemahaman tentang struktur, prinsip-prinsip, dan fungsi sistem hukum tata negara suatu negara. Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang hukum yang paling esensial dalam kehidupan sebuah negara, karena itu, buku ini bertujuan untuk membantu Anda menjelajahi wilayah yang kompleks ini dengan pemahaman yang lebih baik. Hukum Tata Negara menentukan bagaimana sebuah negara diatur, bagaimana kekuasaan pemerintah dibatasi, dan bagaimana hak-hak individu dan lembaga-lembaga pemerintah dilindungi. Buku ini akan membahas konsep dasar seperti kedaulatan, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta menjelajahi berbagai sistem pemerintahan yang ada di dunia.